

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya pajak mempunyai kontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi pajak yang ada di Indonesia membuat pemerintah cukup bergantung pada pajak. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Di Indonesia sendiri pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah (Butar-butar, 2013).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,70%, usaha kecil sebesar 1,13%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. Potensi penerimaan pajak dari usaha kecil menengah (UKM) pada lima tahun mendatang diperkirakan bisa mencapai Rp400 triliun. Namun, butuh dukungan para pelaku UKM di Indonesia demi memenuhi kewajiban membayar pajak sebesar 0,5% dari omzet usahanya ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)).

Bila kita lihat besarnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak yang didapat dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia.

Adapun penyebabnya adalah bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) masih memfokuskan pada Wajib Pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pada pelaku UMKM juga masih rendah.

Oktyawati dan Fajri (2018) menjelaskan di Indonesia UMKM merupakan usaha yang paling berkembang dari segi jumlahnya. UMKM berperan penting dalam perkembangan ekonomi rakyat pada suatu negara dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan potensi tersebut, disinyalir bahwa keberadaan UMKM juga dapat meningkatkan pendapatan pajak bagi negara. Oleh karena itu muncullah beberapa peraturan pemerintah yang diharapkan nantinya dapat memberikan kemudahan bagi seluruh pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Karena selama ini UMKM masih luput dari pengenaan pajak, luputnya pengenaan pajak dari sektor UMKM disebabkan karena belum adanya aturan yang mengatur tentang perpajakan pada sektor UMKM dan rumitnya perhitungan perpajakan. Dengan demikian muncullah beberapa peraturan pemerintah yaitu Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 31 E, PP Nomer 46 Tahun 2013, dan yang terakhir PP Nomer 23 Tahun 2018 ini sebagai jawaban atas permasalahan tersebut yakni memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam hal perpajakannya.

Adapaun tarif pajak UMKM, pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Pada awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang No.36

Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 miliar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan (Tatik, 2018).

Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya. Sayangnya fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50 % ini hanya dapat dinikmati oleh usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjalankan usahanya melalui badan usaha dan untuk perseorangan yang menjalankan usaha Mikro Kecil dan Menengah belum dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak ini.

Adapun kewajiban mengenai penyelengraan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM. Kendala pengembangan UMKM selain tingkat pendidikan yang rendah dan juga kurangnya tingkat pemahaman mengenai teknologi informasi, dan kendala dalam penyusunan laporan keuangan (Muchid, 2015). Pada tahun 2016 terdapat 880 UKM sudah tersertifikasi dan sudah mendapatkan fasilitas dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Dari jumlah UKM yang terdata oleh Dinas Koperassi dan

Usaha Mikro Kota Malang yaitu sebanyak 2.764 ada tiga bidang kategori UKM yakni Fashion, Makanan dan minuman, Handicraft. Setiap kecamatan tersebar tiga kategori tersebut dari kecamatan Blimbing sampai Kecamatan Kedungkandang.

Pada tahun 2013 pemerintah membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 dan mulai diterapkan pada 1 Juli 2013. Peraturan ini membahas mengenai pungutan pajak sebesar 1% dari peredaran bruto, bagi pengusaha dengan peredaran usaha sampai dengan Rp. 4,8 milyar pertahun terhadap Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi. Tarif pajak berupa 1% dari peredaran bruto yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 yang dibayarkan setiap bulan merupakan pajak yang dikenakan bersifat final (Resty dan Ari, 2015).

Pengenaan tarif pajak final sebesar 1% dinilai masih memberatkan para pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Pengenaan tarif PPh final sebesar 1% tidak memberikan keadilan bagi beberapa UMKM karena tetap harus membayar pajak yang terutang walau tidak memperoleh keuntungan/merugi (Rafika, 2018). Dampak lain dari PP ini yaitu sifatnya masih abu-abu maksudnya adalah masih menyisakan kelemahan-kelemahan dari sisi kekuatan hukum sehingga berdampak pada banyaknya celah-celah bagi wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan negatif. Kecenderungan negatif dari pengusaha akan menurunkan tarif atau menjaga omzet tidak melebihi Rp

4,8 milyar. Hal ini tentunya akan merugikan negara karena dapat menurunkan pendapatan negara (Supardi dan Ari, 2017).

Pada bulan Juli 2018 pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1% menjadi PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Pajak Penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Banyak wajib pajak yang mengapresiasi perubahan tarif tersebut. Akan tetapi belum banyak wajib pajak yang memahami isi dari PP tahun 2018. Permasalahan ini muncul karena kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak. Sehingga dalam tatanan pelaksanaan jangka panjang akan menimbulkan masalah (Hendri, 2018).

Zawitri dan Yuliana (2016) menjelaskan bahwa terdapat sedikit peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pontianak sesudah adanya kebijakan 1% perbulan dari omset (peredaran bruto), jika dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan. Hal tersebut ditunjukkan dari total 92 responden tingkat kepatuhan pajak sebelum adanya kebijakan pajak 1% dari omset/bulan sebesar 51% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Sedangkan sesudah adanya kebijakan pajak 1% dari omset/bulan, 52% Wajib Pajak Badan UMKM memiliki tingkat kepatuhan pajak tinggi, sedangkan 48% lagi tingkat kepatuhannya masih rendah. Dikatakan mengalami sedikit

peningkatan karena hanya terpaut 1% saja, hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang diterbitkan pemerintah belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Tatik (2018) menyatakan bahwa pelaku UMKM sangat mengapresiasi tarif pajak baru sebesar 0,5 % yang mulai di berlakukan mulai Juni 2018, Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Adapun kendalanya adalah ketidakpahaman mereka mengenai kepatuhan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala dalam hal kepatuhan pembayaran pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah di paparkan oleh peneliti, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang analisis kepatuhan pajak pada pelaku UMKM tahun 2018. Penelitian ini dilakukan pada pengusaha UMKM yang berdomisili di Kota Malang, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan perpajakannya pada pelaku UMKM.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Tingkat Kepatuhan Pajak pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Tahun 2018?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Tingkat Kepatuhan Pajak pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Tahun 2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmiah kepada penulis maupun pembaca mengenai kepatuhan pajak pada pelaku UMKM tahun 2018. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat bagi pemerintah Kota Malang sebagai bahan evaluasi ataupun pengambilan keputusan.

